

DAFTAR PUSTAKA

Litelatur

- Abidin, S. Z. *Kebijakan Publik*. Salemba Humanika, Jakarta, 2012.
- Agusmidah, *Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Galia Indonesia, Bogor, 2010.
- Anggara, S. *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia, Bandung, 2014.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)*. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Community, G.M. *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*. Total Media, Yogyakarta, 2001.
- Eko Wahyudi, W. Y. (n.d.). *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Fuady, M. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaats)*. Bandung : PT.Refika Aditama, Bandung,2011.
- Hajdon, P. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bima Ilmu, Surabaya, 2007.
- Hakim, A. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. PT. Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Husni, L. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003.
- Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara* R,ajawali Press, Jakarta, 2014.
- Ibrahim, J. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Banyumedia Publishing, Malang, 2006.
- Kementerian Ketenagakerjaan RI (2021). *Buku Saku JKP*, BPJS Ketengakerjaan.
- Koentjoro, Diana Hakim. (2004). *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Maimun.(2004). *Hukum Ketenagakerjaan (Suatu Pengantar)*.Jakarta: PT.Pradya Paramita.

- M.Samsudin. (2008). *Operasionalisasi Penelitian Hukum* . Jakarta : Raja Grafindo.
- Simbolon, M. (2004). *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen* . Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nugroho, R. (2004). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT.Gramedia
- Masry, S. M. (2004). Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen. *Ghalia Indonesia, Jakarta.*
- Rusli, Hardijan. (2004). *Hukum Ketenagakerjaan* . Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekonto, S. (1982). *Pengantar Penelitian Hukum* . Jakarta : UI Press.
- Soematro, R. H. (n.d.). *Metode Penelitian Hukum* . Jakarta : Ghalma Indonesia .
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik Pedelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Beragama Pers .
- Wijayanti, A. (2009). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* . Jakarta : Sinar Grafika.
- Yahya, Y. (2006). *Pengantair Manajemen* .Yogyakarta:Graha Ilmu.



Jurnal

- Ragiliawan, Z., & Gunawan, B. T. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Dalam Perspektif Belanja Negara. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 16(1). (2021).
- Sudrajat, T., Kunarti, S., & Nasihuddin, A. A. Legal Issues in The Implementation of National Social Security System on Labour in Indonesia. In *SHS Web of Conferences* (Vol. 54, p. 03019). EDP Sciences. (2018).
- Anggraeni, R. Evaluasi Kebijakan Publik (Evaluasi Terhadap Proses Pengadaan Anjungan Mandiri Kepegawaian Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 119-127. (2013).

- Kunarti, S., Sudrajat, T., & Handayani, S. W. Transformation of Social Security Administrative Body (BPJS) within Social Security Reform in Indonesia. In *SHS Web of Conferences* (Vol. 54, p. 03017). EDP Sciences. (2018).
- Sokhib, S. Aspek Hukum Atas Tuntutan Tenaga Kerja Terhadap Perusahaan Menurut UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan. *JUSTISI*, 4(1), 1-13. (2019).
- Solechan, S. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 686-696. (2019).
- Sudrajat, T., Kunarti, S., & Nasihuddin, A. A. Legal Issues in The Implementation of National Social Security System on Labour in Indonesia. In *SHS Web of Conferences* (Vol. 54, p. 03019). EDP Sciences. (2018).
- Suhartoyo, S. Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 326-336. (2019).
- Mahendrasusila, F. (2021). Dampak Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Terhadap Sistem Jaminan Sosial Nasional Di Indonesia. *Jurnal Hukum Visio Justisia*, 1(1), 71-97.
- Alfitri, A. (2016). Ideologi Welfare State Dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 9(3), 449-472.
- Wiryadi, K. J., & Novendra, B. (2021). Jaminan Kehilangan Pekerjaan Dampak Pandemi Covid-19: Pengaturan, Manfaat, dan Perbandingannya dengan Negara Lain (Job Loss Insurance Impact of Covid-19 Pandemic: Regulations, Benefits, and Comparisons with Other Countries). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 12(1), 23-41.
- Sinaga, N. A., & Zaluchu, T Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Jurnal Teknologi Industri*, 6. . (2021).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648).

Undang-Undang No 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembar Negara Nomor 36468).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 47).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran Dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 300).

Peraturan Menteri Keuangan nomor 148/PMK.02/2021 tentang tata cara penyediaan, pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana awal dan akumulasi iuran program JKP (Lemba Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1196).

Media Online

WegeIndikator Foundation, “ Jaminan Kehilangan Pekerjaan(JKP) dalam BPJS Ketenagakerjaan”. <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/jaminan-sosial/bpjs-ketenagakerjaan/jaminan-kehilangan-pekerjaan-jkp> (diakses 8 November 2021 pukul 18.50 WIB.)

Wibi Pangestu Pratama,”BPJS Ketenagakerjaan: Hubungan Kerja jadi Tantangan ImplementasiJKP”. <https://finansial.bisnis.com/read/20210601/215/1400201/bpjs->

[ketenagakerjaan-hubungan-kerja-jadi-tantangan-implementasi-jkp](#) (diakses tanggal 15 November 2021 pukul 19.00 WIB.)

TURC “Pandangan Pengamat Ketenagakerjaan tentang aturan JKP”.
<https://lokadata.id/artikel/pandangan-pengamat-ketenagakerjaan-tentang-aturan-jkp> (diakses pada tanggal 9 November 2021 pukul 08.00 WIB)

TURC, “ Resmi diberlakukan, berikut ketentuan PP Jaminan Kehilangan Pekerjaan”.
<https://lokadata.id/artikel/resmi-diberlakukan-berikut-ketentuan-pp-jaminan-kehilangan-pekerjaan> (diakses pada tanggal 9 November 2021 pukul 11.00 WIB.)

